

ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 25 TEMBUNG (PT. BPR NBP 25 TEMBUNG)

Melisa Sirait¹⁾, Ferry Laurensius, S.E., M.Si²⁾, Sumini, S.E., M.M³⁾

¹⁾Akuntansi Keuangan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

email: melisa.sirait@students.wbimedan.com¹⁾, ferry.laurensius@wbi.ac.id²⁾, sumini.salem@wbi.ac.id³⁾

Abstract

PT. BPR NBP 25 Tembung is one of the financial institutions which collects funds from the community and channel it back into the people in the form of credit. This credit facility can increase revenues but also can lead to bad credit risks. Uncollectible credit risk or bad credit may impede BPR operations. Risk can be avoided or minimized by executing consistent internal control structures. If the internal control structure is sufficient in the provision of credit, the implementation of credit provision can be controlled and able to prevent the occurrence of errors that can inflict jeopardy on the bank. This study aims to determine whether the internal control of the credit systems in PT. BPR NBP 25 Tembung are in accordance with internal control elements based on COSO and provide input or improvement that may be applied related to internal control system. The reaserch method is applied research using comparative method in data analyses. Data collection by interview, observation and documentation. The reaserch outcomes indicate that the implementation of internal credite control system in PT. BPR NBP 25 Tembung is quite good, but there are stil certain points which are less suitable with the internal control system based on COSO and BI which need to be improvised.

Keywords: Internal Control System, Lending, Rulals Bank.

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan sangat berperan penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional suatu negara dengan cara berkontribusi memberikan kredit bagi sektor-sektor yang membutuhkan dana. Hal ini dapat terjadi karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dimana bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu jenis perbankan memiliki peran dalam mendorong kemajuan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mikro. Peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia saat ini melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Masalah yang sering terjadi dalam pemberian kredit yang menjadi momok bagi BPR adalah kredit bermasalah yaitu kredit macet. Adanya kredit macet membawa ancaman bagi kelangsungan BPR seperti: terhambatnya perputaran kas karena ketersediaan kas menurun, laba menurun, rasio

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh. Hal ini menunjukkan pengaruh pada kesehatan BPR yang dimana paling tragisnya nasabah tidak memiliki kepercayaan lagi.

PT. BPR NBP 25 Tembung merupakan salah satu badan usaha berbentuk bank perkreditan rakyat yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan dan menyalurkan dana (kredit) kepada masyarakat di daerah Tembung. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

PT. BPR NBP 25 Tembung juga mengalami masalah klasik yang dihadapi BPR-BPR pada umumnya, yaitu kredit bermasalah. Di PT. BPR NBP 25 Tembung itu sendiri tingkat kredit bermasalah atau macet selalu meningkat hampir 2% dari tahun 2014 sampai 2016. Bahkan pada tahun 2016 tingkat NPL menunjukkan, NPL sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Bank Indonesia menetapkan batas untuk NPL BPR adalah

5%(Bank Indonesia, 2015). Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Data LDR, Total Kredit Macet dan NPL PT.BPR NBP 25 Tembung Tahun 2014-2016

Tahun	Loan to Deposit Ratio (LDR)	Total Kredit Macet	Non Performing Loan (NPL)
2014	83,78 %	Rp 154.148.200	0,8881 %
2015	67,62 %	Rp 73.442.300	2,48 %
2016	66,80 %	Rp 205.297.600	5,66 %

Sumber: PT. BPR NBP 25 Tembung

Untuk mencegah risiko-risiko kredit macet yang dapat menghambat operasional BPR maka BPR sangat diperlukan untuk memperhatikan efektivitas struktur pengendalian internal di BPR tersebut. Risiko-risiko dapat dihindari atau diminimalkan dengan melaksanakan struktur pengendalian internal secara konsisten. Jika struktur pengendalian internal yang dimiliki memadai dalam pemberian kredit maka pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit di PT. BPR NBP 25 Tembung sudah sesuai dengan unsur pengendalian internal menurut COSO serta memberikan masukan atau perbaikan yang mungkin bisa diterapkan terkait sistem pengendalian internal.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Penilaian Kredit

2.1.1. Analisis 5C dan 7P

Penilaian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Thamrin & Francis, 2014):

- Character/Watak*
- Capacity/Kemampuan*
- Capital/Modal*
- Collateral/Jaminan*
- Condition of Economic/Kondisi Ekonomi.*

Penilaian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut (Thamrin & Francis, 2014):

- Personality*
- Party*
- Purpose*
- Prospect*
- Payment*
- Prospect*
- Payment*

Aspek-aspek Penilaian Kredit

Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut (Thamrin & Francis, 2014):

- Aspek yuridis/ hukum
- Aspek pemasaran
- Aspek pemasaran
- Aspek teknis/operasi
- Aspek manajemen
- Aspek soasial ekonomi
- Aspek amdal.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna (Bank Indonesia, 2003):

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank.
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Mengurangi keuangan/kerugian, dampak penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2. Elemen-Elemen Sistem

Pengendalian Internal COSO

COSO atau *Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission* memperkenalkan lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu (Robert, 2005):

- Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).
- Pemahaman dan Penilaian / Pengukuran Risiko (*Risk Assessment*).

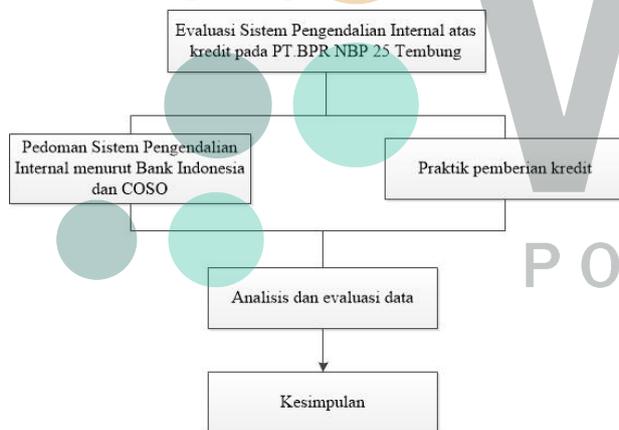
3. Kegiatan Kontrol dan Pemisahan Tugas (*Control Activities*).
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Perbaikan Kontrol Yang Lemah (*Monitoring*).

2.3. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum

Menurut Bank Indonesia, standar sistem pengendalian internal bank terdiri dari 5 elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu (Bank Indonesia, 2003: 5-20):

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi.
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.

2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data Diolah Kembali

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. BPR NBP 25 Tembung yang berlokasi di Jalan Raya Tembung No.15K Ruko Pasar Gambir kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan.

3.2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian terapan yang menggunakan metode komparatif dalam melakukan analisa data. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 1999: 11).

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian dan sasaran penelitian (Suharsini 1998: 15). Yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BPR NBP 25 Tembung.

3.4. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa data yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit dan pengendaliannya.
- b. Data sekunder, diperoleh dari perusahaan dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada PT. BPR NBP 25 Tembung dan dari sumber lainnya seperti buku, jurnal, peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

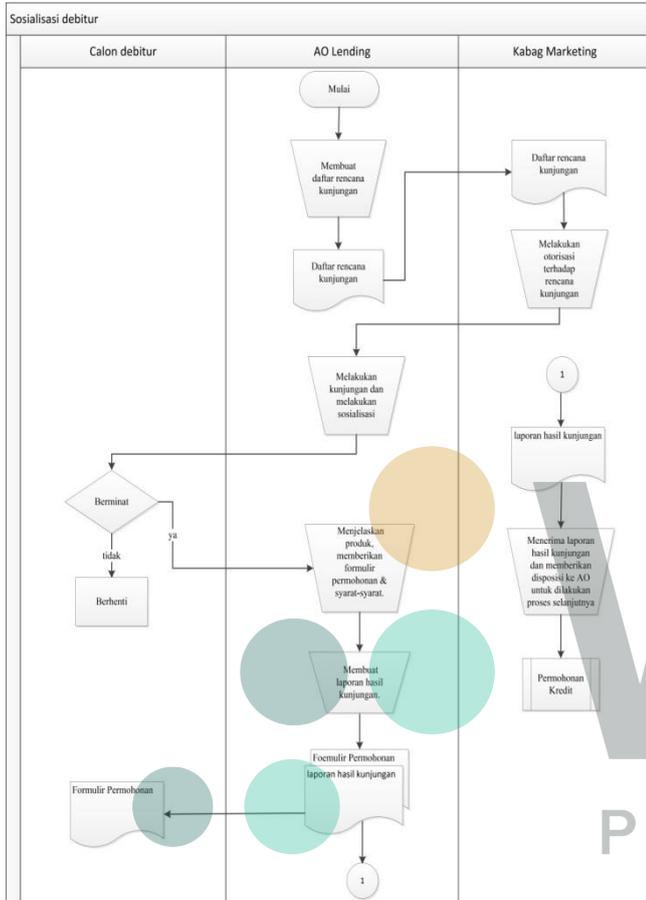
1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan ataupun prosedur pemberian kredit pada PT. BPR NBP 25 Tembung, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini.
3. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada karyawan dan Direktur di BPR NBP 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR NBP 25 Tembung

Secara ringkas gambaran prosedur yang diterapkan oleh BPR NBP 25 dapat dilihat pada gambar-gambar berikut dalam bentuk *flowchart* :

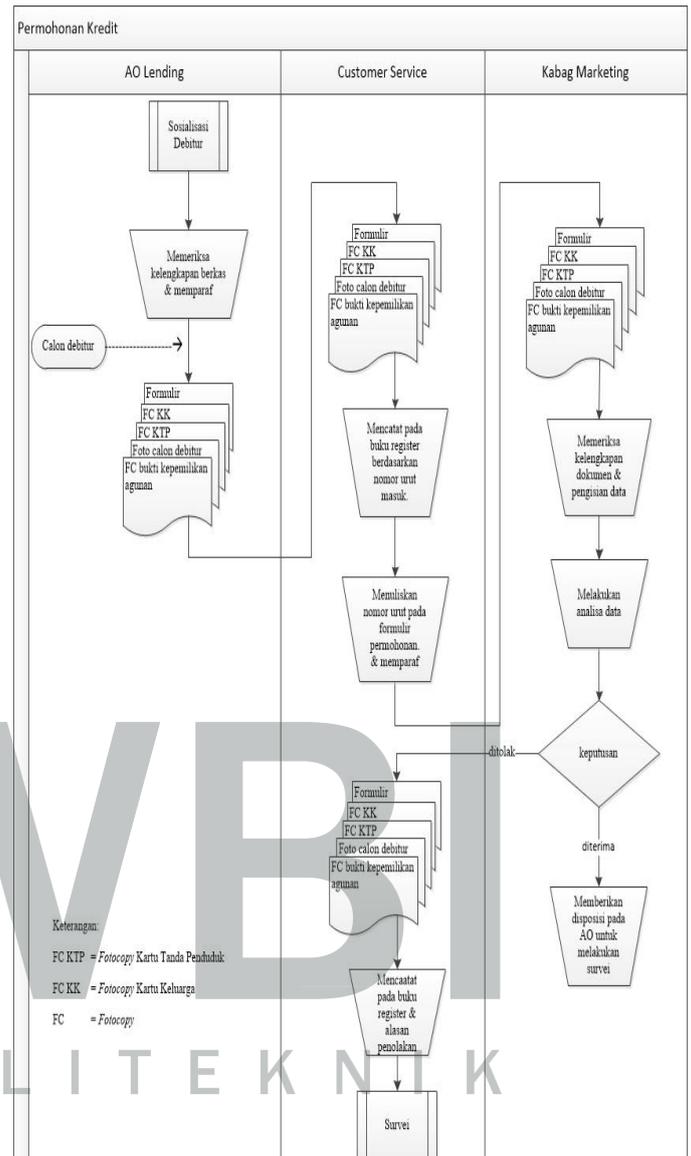
a. Sosialisasi Debitur



Gambar 4.1. Flowchart Pemberian Kredit Tahap Sosialisasi Debitur

Sumber : Data Diolah kembali

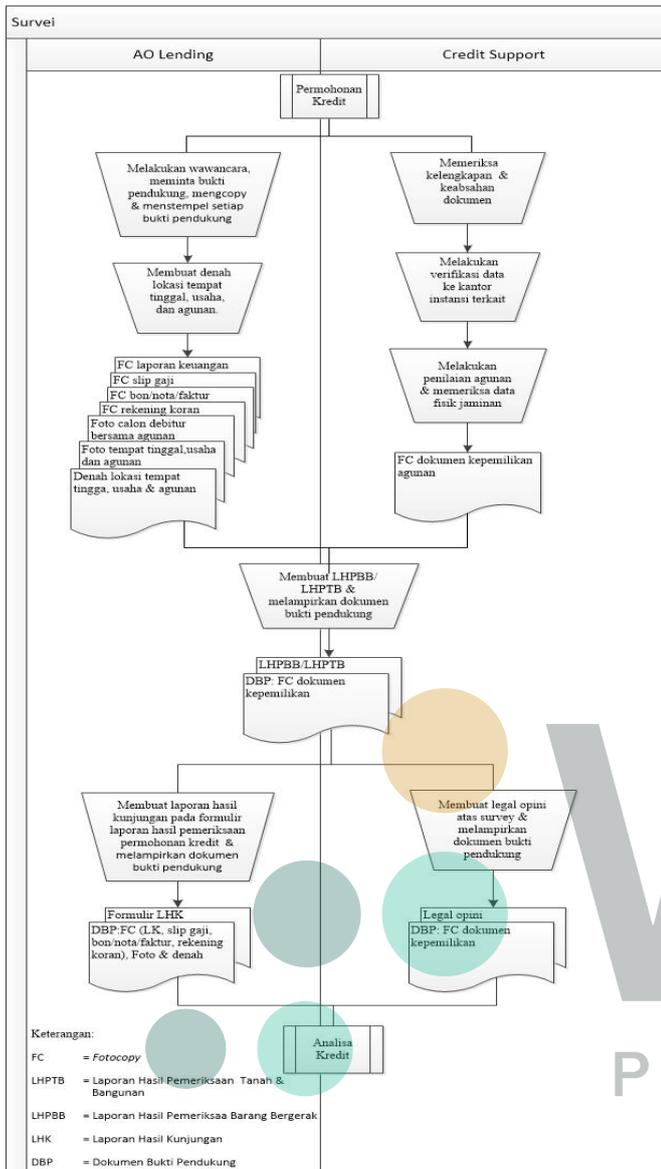
b. Permohonan Kredit



Gambar 4.2. Flowchart Pemberian Kredit Tahap Permohonan Kredit

Sumber : Data Diolah Kembali

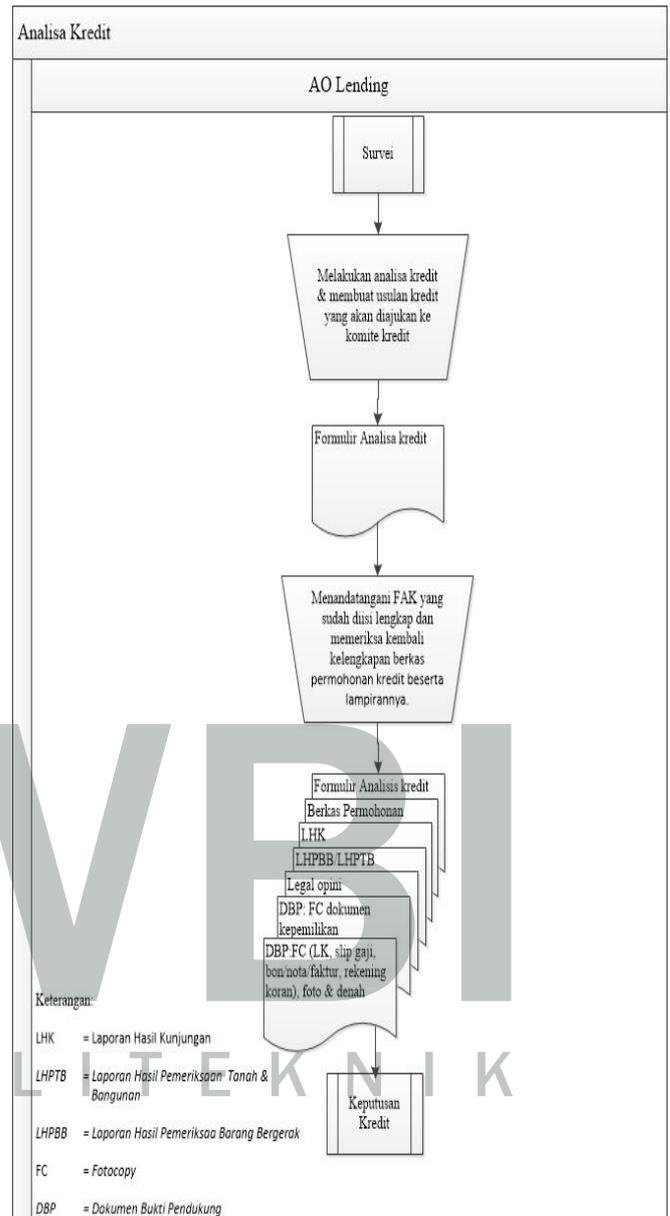
c. Survey



Gambar 4.3. Flowchart Pemberian Kredit Tahap Survei

Sumber : Data Diolah Kembali

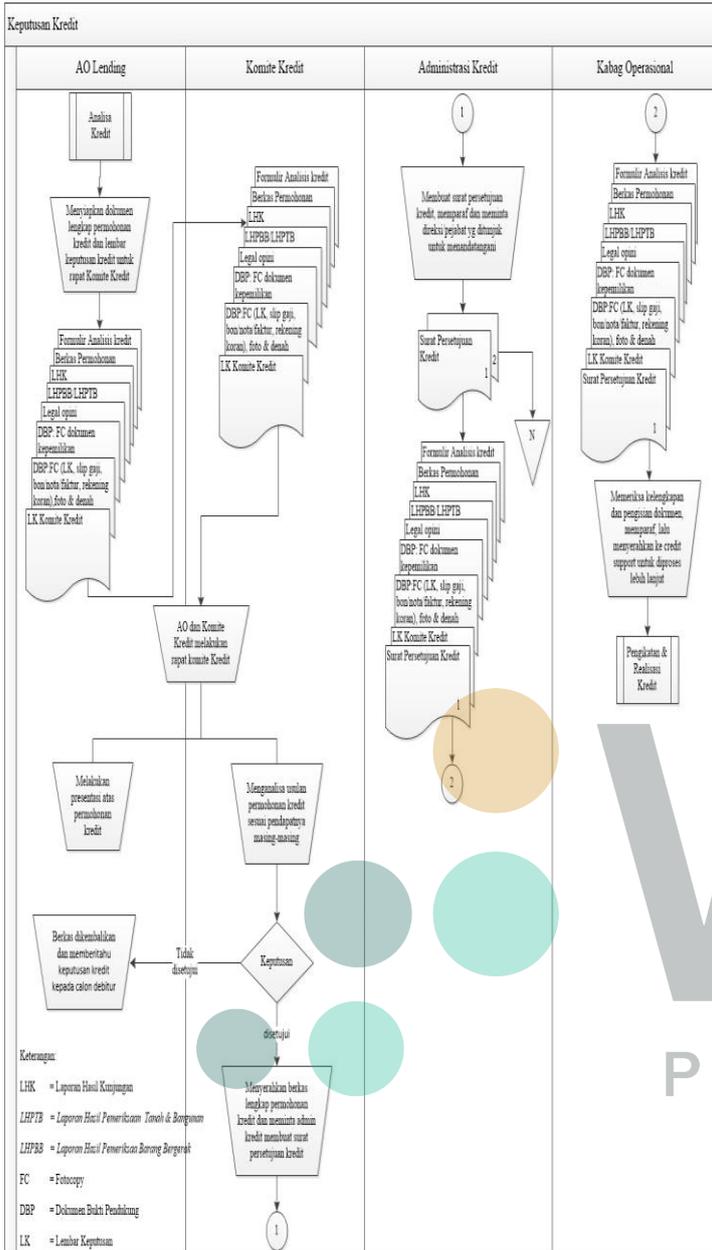
d. Analisa Kredit



Gambar 4.4. Flowchart Pemberian Kredit Tahap Analisa Kredit

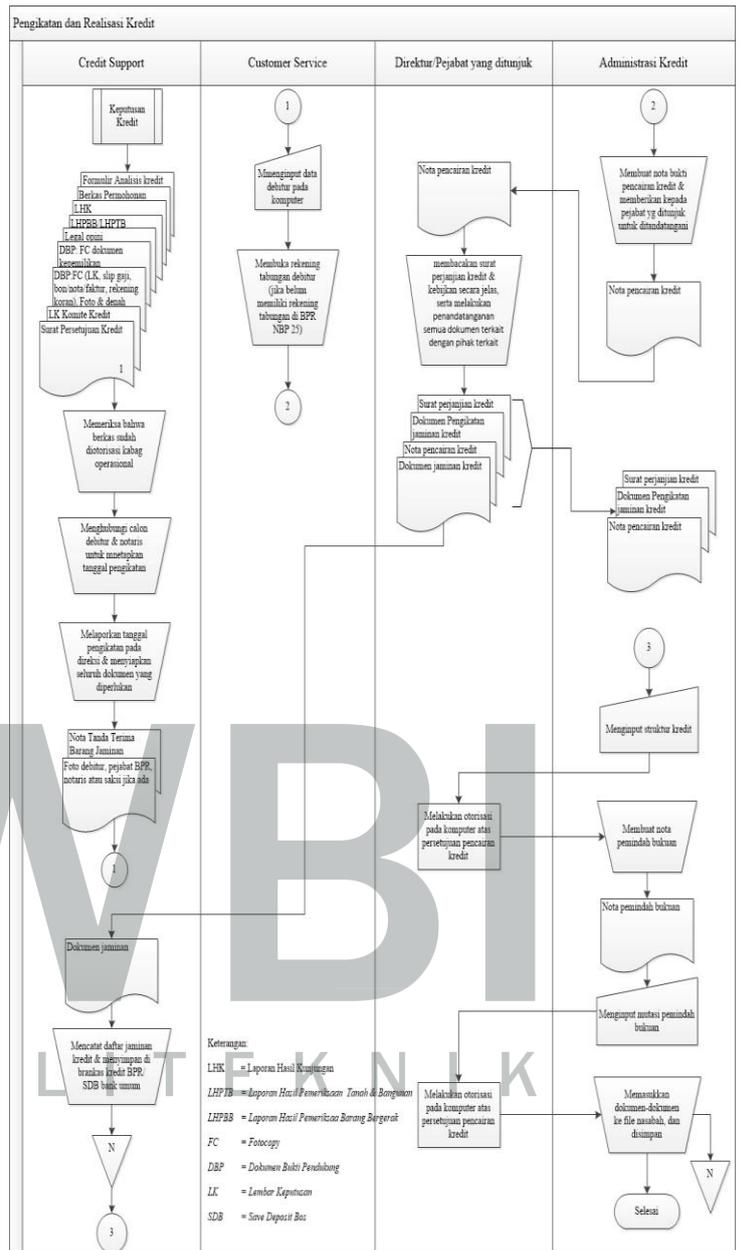
Sumber : Data Diolah Kembali

e. Keputusan Kredit



Gambar 4.5. Flowchart Pemberian Kredit Tahap Keputusan Kredit
 Sumber : Data Diolah Kembali

f. Pengikatan dan Realisasi Kredit



Gambar 4.6. Flowchart Pemberian Kredit Tahap Pengikatan dan Realisasi kredit
 Sumber : Data Diolah Kembali

4.2. Sistem Pengendalian Internal

1. Lingkungan Pengendalian

Tabel 4.1. Perbandingan Kesesuaian Unsur Sistem Pengendalian Internal di BPR NBP 25 Tembung

Unsur SPI	Fakta
Lingkungan Pengendalian Memiliki struktur organisasi	Memiliki struktur organisasi, <i>job description</i> dan SK yang jelas menerangkan pembagian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja. Namun, pada pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai dengan struktur organisasi, yaitu adanya jabatan kosong (bagian monitoring tagihan).
Memiliki integritas dan nilai etik	<ul style="list-style-type: none"> Dalam PKPB memuat tentang komitmen untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional, objektif, cermat dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2a UU Perbankan. Memiliki 4 nilai-nilai dasar yang dianut sebagai dasar dalam menjalankan operasionalnya.
Memiliki kebijakan dan praktek SDM	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki prosedur untuk penerimaan karyawan baru, pelatihan, promosi, pemberian kompensasi. Memiliki kegiatan pelatihan & kegiatan motivasi lainnya.

Sumber: Data Diolah Kembali

2. Penaksiran Risiko

Tabel 4.2. Perbandingan Kesesuaian Unsur Sistem Pengendalian Internal di BPR NBP 25 Tembung

Unsur SPI	Fakta
Penaksiran Risiko Mengidentifikasi, menganalisis dan menilai	Tidak melakukan manajemen risiko secara menyeluruh. BPR NBP 25 Tembung hanya melakukan penaksiran risiko atas debitur (prinsip 5C).
Mengelola perubahan : a. perubahan kegiatan operasional bank b. pegawai baru c. perubahan sistem informasi d. pertumbuhan yang terlalu cepat e. perkembangan teknologi f. pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru g. terjadinya penggabungan usaha (<i>merger</i>), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi bank h. perubahan hukum dan peraturan	BPR NBP 25 hanya mengelola perubahan: <ul style="list-style-type: none"> Dalam penempatan karyawan baru dan penerimaannya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, posisi yang dibutuhkan serta hasil wawancara. Perencanaannya, selalu mengikuti perkembangan perubahan hukum dan aturan/kebijakan dari OJK maupun BI pada pembuatan anggaran kerja di awal tahun.

Sumber: Data Diolah Kembali

3. Aktifitas Pengendalian

Tabel 4.3. Perbandingan Kesesuaian Unsur Sistem Pengendalian Internal di BPR NBP 25 Tembung

Unsur SPI	Fakta
<p>Kegiatan Pengendalian</p> <p>Ada aktivitas <i>control</i> berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>top level review</i> • <i>functional review</i> 	<p>Ada <i>review</i> kinerja yang dilakukan top manajemen yaitu para direksi dalam hal pencapaian target kredit setiap bulan, terhadap target tagihan yang harus dicapai setiap bulan dan laporan pembayaran debitur dari bulan ke bulan.</p>
<p>Memiliki kebijakan dan prosedur</p>	<p>Memiliki dan menjalankan kebijakan dan prosedur kredit yang dimuat dalam PKPB NBP Group, PP BPR NBP 25 Tembung.</p>
<p>Pemisahan tugas/fungsi yang berbeda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam prosedur pemberian kredit ada dijelaskan beberapa fungsi yang terkait. • Pada proses perkreditan ada perangkapan fungsi, yaitu fungsi survei dan fungsi analisa yang dilakukan oleh 1 orang yang sama dari AO <i>Lending</i> yang dapat menimbulkan kecurangan. • Dalam hal monitoring tagihan ada perangkapan tugas (tugas monitoring tagihan dilakukan oleh bagian-bagian lain secara acak, tidak ada ditetapkan satuan khusus untuk menjalankan).
<p>Pengendalian sistem informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kontrol atau fungsi tertentu untuk mengecek akurasi, kelengkapan dan kelayakan otorisasi semua transaksi pemberian kredit, yaitu internal

Unsur SPI	Fakta
	<p><i>control</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kredit mendapatkan otorisasi dari yang berwenang. • Dokumen pemberian kredit telah bernomor urut dan tercetak. • Pencatatan dalam jurnal pemberian kredit didasarkan pada bukti kredit masuk yang telah diotorisasi oleh fungsi yang berwenang dan dilampiri oleh dokumen yang lengkap.
<p>Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan (dihitung dan dicocokkan dengan catatan)</p>	<p>BPR NBP 25 melakukan pencocokan fisik terhadap surat-surat berharga, penyesuaian (penyusutan) secara berkala dan pencocokan catatan dengan kas setiap harinya.</p>

Sumber: Data Diolah Kembali



4. Sistem Informasi dan Komunikasi
Tabel 4.5. Perbandingan Kesesuaian Unsur Sistem Pengendalian Internal di BPR NBP 25 Tembung

Unsur SPI	Fakta
<p>Informasi dan Komunikasi</p> <p>Terdapat sistem informasi akuntansi yang mencakup metode dan catatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sistem informasi akuntansi yang mencakup metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/ membukukan dan melaporkan transaksi bank yang dimuat dalam PKPB & PP BPR NBP 25 Tembung. • Memiliki dan menjalankan sistem informasi manajemen perkreditan dalam bentuk elektronik yang dikenal dengan NBP sistem, maupun bukan elektronik atau manual sistem yang menggunakan formulir/buku/nota.
<p>Mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun eksteren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan informasi kepada pihak debitur terkait perihal kredit maupun perihal BPR itu sendiri. • Mampu memberikan informasi kepada komisaris dan pihak-pihak lainnya yang dibuktikan dengan laporan keuangan. • Mampu memberikan informasi terkait perencanaan operasional, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan satu tahun itu dan mampu mengenali debitur kepada seluruh karyawan BPR NBP.
<p>Memiliki saluran atau arus informasi yang memadai baik informasi ke bawah dan lintas satuan kerja unit</p>	<p>Ditunjukkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki hubungan, yang dibuat dalam bentuk tertulis berupa <i>job description</i>, SK dan PP BPR NBP 25 Tembung agar dapat tercapai pemahaman</p>

Unsur SPI	Fakta
	<p>dan pematuhan kebijakan/prosedur yang berlaku.</p>

Sumber: Data Diolah kembali

5. Kegiatan Pemantauan
Tabel 4.6. Perbandingan Kesesuaian Unsur Sistem Pengendalian Internal di BPR NBP 25 Tembung

Unsur SPI	Fakta
<p>Kegiatan Pemantauan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan secara aktif terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pemberian kredit • Adanya audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern (harus tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai) • Melakukan penilaian/evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemantauan yang menyeluruh maupun audit intern yang menyeluruh. <p>Pengawasan yang ada di BPR NBP 25 hanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada kelengkapan dokumen dan pengadministrasian terkait pelaksanaan pemberian kredit oleh internal <i>control</i> yang dilakukan 1 orang saja. • memantau jalannya tagihan kredit dengan memperhatikan tenggang waktu kredit debitur yang harus segera dilakukan kunjungan atau pungutan. • pemberian peringatan kepada debitur apabila cicilan atau bunga yang jatuh tempo tidak dibayar tepat pada waktunya ada 3 kali. Pemberian peringatan menggunakan <i>desk call</i> dan <i>blast sms</i> yang sudah otomatis, dan surat untuk peringatan ke tiga. • pengawasan oleh komisaris yang dilakukan empat kali dalam setahun.

Sumber: Data Diolah Kembali

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan bahwa:

1. BPR NBP 25 Tembung memiliki struktur organisasi yang tidak sesuai pada pelaksanaannya, yaitu adanya jabatan kosong (bagian monitoring tagihan).
2. BPR NBP 25 Tembung tidak melakukan manajemen risiko secara menyeluruh. BPR NBP 25 Tembung hanya melakukan penaksiran risiko atas debitur (prinsip 5C).
3. Pada proses perkreditan ada perangkapan fungsi, yaitu fungsi survei dan fungsi analisa yang dilakukan oleh 1 orang yang sama dari *AO Lending* yang dapat menyebabkan kecurangan.
4. Dalam hal monitoring tagihan ada perangkapan tugas (tugas monitoring tagihan dilakukan oleh bagian-bagian lain secara acak, tidak ada ditetapkan satuan khusus untuk menjalankan) yang dapat menyebabkan kecurangan dan menghambat pekerjaan lainnya.
5. BPR NBP 25 hanya melakukan pengawasan pada kelengkapan dokumen dan pengadministrasian terkait pelaksanaan pemberian kredit oleh *internal control* yang dilakukan 1 orang saja dan tidak ada penetapan atau pembentukan satuan kerja khusus untuk pemantauan secara aktif terhadap keseluruhan pelaksanaan pemberian kredit.
6. BPR NBP 25 tidak melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi dan persaingan usaha debitur pada saat kredit sudah diberikan.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BPR NBP 25, yaitu:

1. BPR NBP 25 hendaknya selalu melakukan penyesuaian dan perbaikan struktur organisasi agar saluran atau arus informasi memadai, tujuan dan proses yang dilaksanakan sejalan.
2. BPR NBP 25 sebaiknya melakukan manajemen risiko secara menyeluruh

karena dapat mempengaruhi pencapaian sasaran atau tujuan.

3. BPR NBP 25 hendaknya memisahkan perangkapan fungsi yang ada dalam proses pemberian kredit, yaitu survei dan analisa kredit yang dilakukan oleh orang yang berbeda dari *AO Lending*.
4. BPR NBP 25 hendaknya menetapkan kembali satuan fungsi monitoring tagihan, sehingga tidak ada perangkapan tugas.
5. BPR NBP 25 hendaknya menambahkan personil pada bagian *Internal Control* dan mengembangkan lagi program *internal control* atau membentuk Satuan Audit atau Komite Audit untuk pemantauan secara aktif terhadap keseluruhan pelaksanaan pemberian kredit (pemantauan terhadap tujuan, strategi pencapaian, pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan).
6. BPR NBP 25 hendaknya melakukan pemantauan perkembangan ekonomi dan persaingan usaha debitur pada saat kredit berjalan karena dapat membantu BPR mengantisipasi kejadian yang akan terjadi pada kredit yang diberikan. Dengan demikian, secara tidak langsung BPR telah menciptakan loyalitas debiturnya sendiri. Sehingga hubungan kekeluargaan yang diinginkan BPR NBP 25 dengan debitur yang tidak hanya sekedar hubungan uang dan bank juga bisa tercapai.

6. REFERENSI

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga keuangan*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirah, Ahmad. 2013. *Tinjauan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hassanuddin.
- Bahrul Ulum Ilham, 2016, *UMKM Outlook 2017*, Forum Komunitas UMKM, dilihat 16 Juli 2017, http://fokus.ukm.com/umkm_outlook_2017
- Bank Indonesia, 2003, *Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum dan Surat Edaran No.5/22/DPNP*, Bank Indonesia, dilihat 4 Agustus 2017, <http://bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/contents/perbankan-2003.aspx>
- Bank Indonesia, 2013. *Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran No.14/26/DKBU*, dilihat 4 Agustus 2017, <http://bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/contents/perbankan-2003.aspx>
- Dunil, Z. 2004. *Risk Based-Audit*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Jakarta: PT. Ideks
- Fatmawandini, Ainur Zurlis. 2015. Analisa Pengendalian Intern pemberian Kredit (Studi Kasus Pada BPR Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Jember .
- Hadi, Pemi Rosalina dan Yuliasuti Rahayu. 2014. Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank danamon Kembang Jepun surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2(11). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi revisi 2014. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi revisi 2014. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Muzamil, Mohammad. 2015. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda (Studi Kasus Di BRI Kcp Unit Karang Paci Samarinda). *E - Journal Ilmu Administrasi Bisnis*. Vol 3(3): 661-674. Jurusan Ilmu Admistrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Mulawarman.
- Otoritas Jasa Keuangan 2013, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998*, dilihat 2 Agustus 2017, <http://ojk.go.id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-no-10-tahun-1998.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Data Dan Statistik Laporan Keuangan Perbankan*, dilihat 24 Mei 2018, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>
- Pradnyamita, Made Weni dkk. 2016. Pengaruh Penyaluran Kredit dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *E – Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 4. Jurusan Manajemen - Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Purwatiasih, Ayu Dwi dkk. 2014. Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Pada BPR. Kanaya. *E – Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurusan Akuntansi Program S1 - Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

- Rama, Dasaratha V dan Fredrick L. Jones. 2011. *Accounting Information System*. Buku 1. Penerjemah: M Slamet Wibono. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Samosir, Hendrik Elisa Sutejo. 2016. *Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT Bank Sumut Cabang Sidikalang*. Medan: Universitas HKBP Nomensen.
- Sugiono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit CV.Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Tampubolon, Robert. 2005. *Risk and Systems Based Internal Audit*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

